



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Ilir Timur I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30126

Telepon : (0711) 352388, 312421

Laman : www.sumselprov.go.id, Pos-el : sumsel@sumselprov.go.id

Palembang, 08 Januari 2026

Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

di -
Palembang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.7.2.2 / 012 /SP/VII/2025

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan daftar terlampir. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.	1 (satu) berkas	-

Diterima tanggal
Penerima,

(.....)
NIP.
No. telepon

KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Prof. Dr. H. ACHMAD TARMIZI, Ph.D
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196606091995121001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Nama Unit : Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan Penyusunan Kebijakan, Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pemantauan dan Evaluasi Program Kegiatan dan Penyelenggaraan Pembinaan Teknis, Administratif, Sumber Daya dan Fasilitas di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, Kepegawaian, Administrasi Pelayanan Publik dan Pembinaan Serta Peningkatan Kinerja Aparatur
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Provinsi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan teknis, administratif dan sumber daya Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Sasaran : 1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Fasilitas Pembinaan Reformasi Birokrasi 2. Nilai Laporan Akuntabilitas terhadap SAKIP komponen pelaporan (15)	Perangkat Daerah	Asistensi Pelaksanaan Implementasi Reformasi Birokrasi	Seluruh Perangkat Daerah terkait	Road Map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
		3. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Indek yang mengukur sebagai bahan mengevaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	penilaian dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB RI	Kementerian PAN-RB RI	Biro Organisasi
		4. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	Mengkompilasi Nilai Indeks SKM Perangkat Daerah	Indeks yang dikeluarkan Oleh Kementerian PAN RB RI dari hasil evaluasi penyelenggara pelayanan publik di Lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Se Sumatera Selatan	Kementerian PAN-RB RI	Biro Organisasi
				$SKM = \frac{\text{total nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$		Laporan SKM Perangkat Daerah	Biro Organisasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	Penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja dan tatalaksana Perangkat Daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan Perangkat Daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelaksanaan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.	$\text{Kematangan Organisasi Daerah} = \frac{\text{Total Nilai Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}}$	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018	Biro Organisasi
		6. Perangkat Daerah yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan	Persentase	Fasilitasi Penataan Kelembagaan pada Perangkat Daerah Provinsi terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100% sesuai dengan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri RI	Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi	Biro Organisasi
		7. Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisa beban kerja	Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	$\frac{(\text{Jumlah PD yg menerapkan Anjab} - \text{ABK})}{(\text{Jumlah PD yg tidak menerapkan Anjab} - \text{ABK})} \times 100\%$	- Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemprov Sumsel - Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemprov Sumsel - Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemprov Sumsel	Biro Organisasi

No. (1)	Tujuan / Sasaran (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Satuan (4)	Definisi Operasional (5)	Rumus Penghitungan (6)	Sumber Data (7)	Penanggung Jawab (8)
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi	8. Tingkat Implementasi E-SAKIP Biro Organisasi	Persentase	Tingkat Implementasi E-SAKIP Perangkat Daerah adalah ukuran capaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik pada suatu perangkat daerah, yang menggambarkan kemampuan OPD dalam mengintegrasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja ke dalam aplikasi E-SAKIP sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Komponen SAKIP yg terinput pada E-SAKIP sesuai standar}}{\text{Jumlah seluruh komponen E-SAKIP}} \times 100\%$	Laporan dan Dokumen SAKIP	Biro Organisasi
	3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat Daerah	9. Persentase Pelayanan Umum, Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum, Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	100% Laporan dan Dokumen	Laporan dan Dokumen Hasil Pelayanan Umum, Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Biro Organisasi

Palembang, 18 Januari 2026
KEPALA BIRO ORGANISASI,

Prof. Dr. H. ACHMAD TARMIZI, Ph.D
 Pembina Utama (IV/e)
 NIP. 196606091995121001